



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 3 TAHUN 2005**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan satu tahun sekali dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4165);
13. Peratutan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usah Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perbendaharaan Daerah Kabupaten Temanggung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
DAN
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN
ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005
dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Anggaran Pendapatan Daerah | Rp 318.717.723.434,00 |
| 2. | Anggaran Belanja Daerah | <u>Rp 309.626.719.984,00</u> |
| | Surplus | Rp 9.091.003.450,00 |
| 3. | Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2005 | |
| | a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp 9.444.204.065,00 |
| | b. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp 18.535.207.515,00</u> |
| | Selisih (a-b) | Rp 9.091.003.450,00 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan Daerah, Anggaran Belanja Daerah, dan Anggaran Pembiayaan Daerah;
2. Lampiran II Daftar Rekapitulasi anggaran Pendapatan Daerah dan Anggaran Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Daerah;
3. Lampiran III Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan;
4. Lampiran IV Daftar Pinjaman Daerah;
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Semesteran pelaksanaan APBD kepada DPRD dan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Pasal 6

Surplus anggaran digunakan untuk pembayaran pokok utang dan bunga atas pinjaman yang ditarik dan digunakan pada Tahun Anggaran 2004.

Pasal 7

DPRD Kabupaten Temanggung memberi persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk melakukan penarikan pinjaman kepada pihak ketiga pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 21 Mei 2005

BUPATI TEMANGGUNG,
ttd

H. MUKHAMAD IRFAN

Diundangkan di Temanggung
Pada tanggal 21 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH,
ttd

M. SETYO ADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2005 NOMOR 3

LAMPIRAN I

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 6 Tahun 2005

Tanggal 2 November 2005

**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2005**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
I	PENDAPATAN	318.717.723.434,00	317.120.193.733,00	(1.597.529.701)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	27.127.394.434,00	21.881.527.256,00	(5.245.867.178)
1.1.1	PAJAK DAERAH	4.190.000.000,00	4.205.000.000,00	15.000.000
1.1.2	RETRIBUSI DAERAH	11.246.202.434,00	12.754.739.434,00	1.508.537.000
1.1.3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYA	3.042.992.000,00	3.273.587.822,00	230.595.822
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.648.200.000,00	1.648.200.000,00	(7.000.000.000)
1.2	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	265.245.329.000,00	268.893.666.477,00	3.648.337.477
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	11.863.556.000,00	12.453.240.477,00	589.684.477
1.2.2	Dana Alokasi Umum	233.303.000.000,00	233.303.000.000,00	0
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	11.320.000.000,00	11.320.000.000,00	0
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	8.758.773.000,00	11.817.426.000,00	3.058.653.000
1.3	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH	26.345.000.000,00	26.345.000.000,00	0
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	26.345.000.000,00	26.345.000.000,00	0
1.4.1	PERHITUNGAN Fihak KETIGA		0,00	0
I.1	BELANJA	309.626.719.984,00	303.193.410.195,00	(6.433.309.798)
2.1	APARATUR DAERAH	216.546.863.828,00	216.669.952.114,00	123.093.286
2.1.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	182.368.511.238,00	181.837.132.163,00	(515.419.075)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
2.1.1.01	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	171.443.938.669,00	171.235.580.536,00	(208.358.163)
2.1.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	8.434.006.429,00	7.984.563.804,00	(449.442.625)
2.1.1.03	BELANJA PERJALANAN DINAS	1.091.824.510,00	1.218.992.223,00	127.167.713
2.1.1.04	BELANJA PEMELIHARAAN	1.418.781.600,00	1.433.995.600,00	15.214.000
2.1.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	33.869.005.090,00	34.387.687.951,00	518.682.861
2.1.2.01	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	30.552.485.184,00	30.093.124.874,00	(459.360.310)
2.1.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	972.567.000,00	1.339.512.250,00	666.945.250
2.1.2.03	BELANJA PERJALANAN DINAS	686.194.000,00	899.257.313,00	213.063.313
2.1.2.04	BELANJA PEMELIHARAAN	1.957.758.906,00	2.055.793.514,00	98.034.608
2.1.3	BELANJA MODAL	289.307.500,00	409.137.000,00	119.829.500
2.1.3.02	Belanja Bantuan		0,00	0
2.1.3.05	Belanja Modal Jaringan		0,00	0
2.1.3.06	BELANJA MODAL GEDUNG BANGUNAN TEMPAT KERJA	15.000.000,00	15.000.000,00	0
2.1.3.12	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	233.821.500,00	311.821.500,00	78.000.000
2.1.3.13	Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	31.986.000,00	73.815.500,00	41.829.500
2.1.3.14	Belanja Modal Alat Olah Raga	2.500.000,00	2.500.000,00	0
2.1.3.18	Belanja Modal Hewan Ternak dan Tanaman		0,00	0
2.1.3.19	Belanja Modal Alat-alat Keamanan	6.000.000,00	0,00	0
2.2	PELAYANAN PUBLIK	49.083.533.256,00	44.256.916.181,00	(4.826.617.075)
2.2.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	1.065.477.400,00	165.355.200,00	(1.222.200)
2.2.1.01	BELANJA PEGAWAI/PERSONALIA	607.622.100,00	559.468.900,00	(48.153.200)
2.2.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	53.970.300,00	53.970.300,00	0
2.2.1.03	BELANJA PERJALANAN DINAS	160.000.000,00	160.000.000,00	0
2.2.1.04	BELANJA PEMELIHARAAN	243.885.000,00	291.916.000,00	48.031.000
2.2.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	16.719.918.000,00	21.606.266.125,00	4.886.348.125
2.2.2.01	BELANJA PEGAWAI DAN PERSONALIA	3.435.636.000,00	3.659.041.000,00	223.405.000
2.2.2.02	BELANJA BARANG DAN JASA	12.152.549.400,00	16.130.785.225,00	3.978.235.825
2.2.2.03	BELANJA PERJALANAN DINAS	869.462.500,00	1.551.177.800,00	681.715.300

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
2.2.2.04	BELANJA PEMELIHARAAN	262.270.100,00	265.262.100,00	2.992.000
2.2.3	BELANJA MODAL	31.290.137.856,00	21.505.294.856,00	(9.784.843.000)
2.2.3.01	Belanja Tanah Bengkok	65.195.000,00	65.195.000,00	0
2.2.3.02	Belanja Bantuan	13.447.857.825,00	8.213.357.825,00	(5.234.500.000)
2.2.3.03	Belanja Modal Bangunan Air (Irigasi)	2.639.000.000,00	2.305.000.000,00	(334.000.000)
2.2.3.04	Belanja Modal Sistem Informasi Manajemen	800.090.000,00	800.090.000	0
2.2.3.05	Belanja Modal Jaringan	660.030.750,00	660.107.250,00	151.500
2.2.3.06	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.074.795.201,00	7.485.347.701,00	330.552.500
2.2.3.07	Belanja Modal Alat Komunikasi		0,00	0
2.2.3.09	Belanja Modal Alat-alat Angkutan	920.500.000,00	590.500.000,00	(330.000.000)
2.2.3.10	Belanja Alat-alat Bengkel		0,00	0
2.2.3.11	Belanja Modal Alat-alat Pertanian	93.355.000,00	526.030.000,00	432.675.000
2.2.3.12	Belanja Modal Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	494.950.000,00	537.999.000,00	43.049.000
2.2.3.13	Belanja Modal Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi	74.750.000,00	78.339.000,00	3.589.000
2.2.3.14	Belanja Modal Alat Kesehatan		0,00	0
2.2.3.15	Belanja Modal Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah	6.140.000,00	120.962.000,00	114.822.000
2.2.3.16	Belanja Modal Buku/Perpustakaan	2.406.774.000,00	62.297.000,00	(2.344.477.000)
2.2.3.17	Belanja Modal Barang bercorak Kesenian		0,00	0
2.2.3.19	Belanja Modal Alat-alat Persenjajalan/Keamanan		0,00	0
2.2.3.20	Belanja Modal Sarana Kebersihan	2.614.700.000,00	220.000.000,00	(2.394.700.000)
2.3	BELANJA TRANSFER	42.496.322.900,00	41.966.536.900,00	(529.786.000)
2.3.1	Belanja Hadiah	107.000.000,00	107.000.000,00	0
2.3.1.01	Belanja Hadiah kepada Kecamatan	26.000.000,00	26.000.000,00	0
2.3.1.02	Belanja Hadiah kepada Desa	81.000.000,00	81.000.000,00	0
2.3.2	Belanja Bantuan	9.506.090.000,00	9.520.690.000,00	14.600.000
2.3.2.01	Belanja Bantuan kepada Pemerintah Kelurahan/Desa	8.579.679.000,00	8.585.679.000,00	6.000.000
2.3.2.02	Belanja Bantuan kepada Pihak Lain	889.975.000,00	889.975.000,00	0
2.3.2.03	Belanja Bantuan Pemerintah Kecamatan	36.636.000,00	36.136.000,00	(500.000)
2.3.2.04	Bantuan Koordinasi Kelembagaan	70.000.000,00	77.100.000,00	7.100.000

KODE KEFENING	URAIAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
2.3.2.05	Belanja Bantuan kepada TP.PKK	9.800.000,00	9.800.000,00	0
2.3.3	BELANJA TRANSFER	32.883.231.900,00	32.338.846.900,00	(544.386.000)
2.3.3.01	Belanja Bantuan	13.536.967.000,00	14.258.951.000,00	721.984.000
2.3.3.02	Belanja Hadiah	17.059.446.900,00	1.743.071.900,00	(16.375.000)
2.3.3.03	Bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	25.000.000,00	25.000.000,00	0
2.3.3.04	Belanja Subsidi	2.261.824.000,00	1.011.824.000,00	(1.250.000.000)
2.3.3.05	Bantuan kepada Pemerintah Kecamatan		0,00	0
2.4	BELANJA TIDAK TERLANGKA	1.500.000.000,00	300.000.000,00	(1.200.000.000)
2.4.1.01	Belanja Tidak Tersangka	1.500.000.000,00	300.000.000,00	(1.200.000.000)
2.4.1.1	Belanja Tidak Tersangka		0,00	0
			0,00	0
	SURPLUS (DEFISIT)	9.091.003.450,00	13.926.783.530,00	4.835.780.080
	SURPLUS (DEFISIT)	9.091.003.450,00	13.926.783.530,00	4.835.780.080
	SURPLUS (DEFISIT)	9.091.003.450,00	13.926.783.530,00	4.835.780.080
			0,00	0
1.1.1	PEMBIAYAAN	(9.091.003.450,00)	(13.926.783.530,00)	(4.835.780.080)
3.1	PEMERIMAAN PEMBIAYAAN	9.444.204.065,00	4.608.423.977,00	(4.835.780.080)
3.1.1	Bisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Lalu	1.500.000.000,00	4.608.423.977,00	3.108.423.977
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan		0,00	0
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	7.944.204.065,00	0,00	(7.944.204.065)
3.1.4	Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan		0,00	0
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.535.207.515,00	10.535.207.515,00	0
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan		0,00	0
3.2.2	Penyertaan Modal	2.383.000.000,00	2.383.000.000,00	0
3.2.3	Pembayaran Hutang Pokok yang Jauh Tempo	16.152.207.515,00	16.152.207.515,00	0
3.2.4	Bisa Lebih Perhitungan Tahun Bertalan		0,00	0

**REKAPITULASI APBD PERSATUAN KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Tahun Anggaran 2005**

KODE SATKER	URAIAN DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA					SURPLUS DEFISIT	PEMBAYAAN		
			APARATUR	PUBLIK	TRANSFER	TIDAK TERSANGKA	JUMLAH		PENERIMAAN	PENSELUARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9=3-8	10	11	12=10+11
01	BIDANG PEMERINTAHAN LISUM	307.665.271.000	49.339.248.359	9.231.788.400	23.332.084.800	1.500.000.000	83.403.121.659	224.262.149.341	9.444.204.065	18.535.207.515	(9.091.003.450)
0101	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0	3.898.888.000	0	0	0	3.898.888.000	-3.898.888.000	0	0	0
0102	SEKRETARIAT DPRD	0	5.355.062.750	0	0	0	5.355.062.750	-5.355.062.750	0	0	0
0103	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	0	2.010.457.200	0	0	0	2.010.457.200	-2.010.457.200	0	0	0
0105	SEKRETARIAT DAERAH	303.310.521.000	15.711.532.450	5.228.654.000	12.700.041.500	1.500.000.000	35.140.227.950	268.170.293.050	9.444.204.065	18.535.207.515	(9.091.003.450)
0106	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	1.012.010.800	850.428.000	183.815.000	0	2.046.253.800	-2.046.253.800	0	0	0
0107	BADAN PENGAWAS	0	914.697.000	143.465.000	0	0	1.058.162.000	-1.058.162.000	0	0	0
0108	DINAS PENDAPATAN DAERAH	4.190.000.000	1.274.115.670	156.509.600	107.000.000	0	1.537.625.270	2.652.374.730	0	0	0
0113	KEC. TEMANGGUNG	25.000.000	2.761.907.000	25.700.000	665.150.000	0	3.452.757.000	-3.431.757.000	0	0	0
0114	KEC. TEMBARAK	4.000.000	478.942.000	19.700.000	464.000.000	0	962.642.000	-958.642.000	0	0	0
0115	KEC. PRINGSURAT	17.000.000	541.597.474	20.200.000	430.450.000	0	992.247.474	-975.247.474	0	0	0
01116	KEC. KALORAN	8.000.000	439.171.000	20.200.000	470.000.000	0	929.371.000	-923.371.000	0	0	0
0117	KEC. PARAKAN	35.500.000	861.309.000	21.200.000	530.200.000	0	1.412.709.000	-1.377.209.000	0	0	0
0118	KEC. BULU	30.000.000	501.859.000	22.700.000	643.500.000	0	1.168.059.000	-1.138.059.000	0	0	0
0119	KEC. KEDU	10.000.000	616.606.000	20.200.000	473.750.000	0	1.110.556.000	-1.100.556.000	0	0	0

KODE SATKER	URAIAN DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA					SURPLUS DEFISIT	PEMBAYARAN		
			APARATUR	PUBLIK	TRANSFER	TIDAK TERSANGKA	JUMLAH		PENERIMAAN	PENGELUARAN	JUMLAH
0120	KEC. KANDANGSAH	5.000.000	598.160.619	31.300.000	510.450.000	0	1.037.810.618	(1.037.810.618)	0	0	0
0121	KEC. CANDIROYO	7.800.000	524.505.017	30.300.000	467.350.000	0	1.019.854.027	(1.011.854.027)	0	0	0
0122	KEC. MASAREJO	4.500.000	275.410.033	39.300.000	709.050.000	0	1.512.660.033	(1.500.160.033)	0	0	0
0123	KEC. JUMBO	3.000.000	473.573.579	19.700.000	462.500.000	0	951.773.578	(959.773.578)	0	0	0
0124	KEC. MONOBOYO	1.000.000	443.493.254	19.700.000	454.775.000	0	917.373.204	(916.373.204)	0	0	0
0125	KEC. KRANGSAH	15.100.000	719.795.350	19.605.000	456.300.000	0	1.205.690.350	(1.195.420.350)	0	0	0
0126	KEC. BEBEH	1.000.000	493.060.980	30.300.000	494.300.000	0	1.000.360.980	(1.007.360.980)	0	0	0
0127	KEC. KLEDUNG	1.500.000	507.209.311	19.200.000	400.300.000	0	925.209.311	(934.209.311)	0	0	0
0128	KEC. BANGSAI	2.000.000	510.739.190	19.200.000	450.450.000	0	920.209.190	(926.209.190)	0	0	0
0129	KEC. TLOSOMUKO	750.000	543.289.672	19.200.000	413.250.000	0	973.739.672	(972.069.672)	0	0	0
0130	KEC. SELOPANWANG	1.000.000	408.635.631	19.300.000	411.000.000	0	829.825.621	(827.825.621)	0	0	0
0131	KEC. GEMANG	1.000.000	503.236.205	19.300.000	341.300.000	0	862.736.205	(861.736.205)	0	0	0
0132	KEC. TRETEP	500.000	326.588.045	19.700.000	354.750.000	0	710.140.045	(709.640.045)	0	0	0
0135	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	0	2.205.005.061	0	0	0	2.205.005.061	(2,205,005,061)	0	0	0
0136	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	0	872.841.929	195.000.000	27.000.000	0	1.074.841.929	(1,076,101,929)	0	0	0
0137	BADAN PENGELOLA DAN PENGENDALI DAMPAK LINGK.	0	754.133.564	54.360.000	0	0	811.000.564	(811,000,564)	0	0	0
0138	DINAS TRAFIK DAN LINTAS	0	2.059.394.929	171.621.000	144.295.000	0	3.174.270.929	(3,174,270,929)	0	0	0
0139	DINAS SOSIAL	0	880.300.366	40.211.000	101.200.000	0	1.020.300.366	(1,020,300,366)	0	0	0
0140	KANTOR ARSEP DAN KORUPSI	0	551.116.683	36.472.000	0	0	577.588.683	(577,588,683)	0	0	0
0141	KANTOR KESTUNGAN BANGSA	0	434.056.132	72.561.000	375.764.000	0	882.381.132	(882,381,132)	0	0	0
02	BIDANG INFRASTRUKTUR	47.230.000	7.542.727.206	12.299.639.500	1.000.000.000	0	20.810.542.206	(20,810,542,206)	0	0	0

KODE SAJER	URAIAN DAN UNIT ORGANISASI	PENDAPATAN	BELANJA				SURPLUS/DEFISIT	PEMBELANJAN			
			APARATUR	UMUM	TRANSFER	TIDAK TERSEKESKA		JUMLAH	PEREKONOMIAN	PEMBELANJAN	JUMLAH
0303	DINAS BINABERSAMA DAN PENGADAN	79.000.000	2.550.556.435	10.014.571.500	0	0	13.565.127.934	(13.484.537.934)	0	0	0
0304	DINAS CIPTA KARYA DAN TERA BUNYI	40.100.000	4.604.257.250	1.434.647.000	1.068.000.000	0	7.327.004.250	(6.923.904.250)	0	0	0
03	BIDANG BELAJAR DAN ILMU	8.927.000.000	149.272.309.563	34.233.094.400	2.079.391.000	0	165.581.014.959	(156.654.014.959)	0	0	0
0301	BIDANG PEMBELAJARAN	7.827.000.000	8.664.204.139	5.136.329.500	306.000.000	0	14.467.427.639	(6.639.427.639)	0	0	0
0302	DINAS KEBUDAYAAN DAN KEMAHENDIKAN	600.000.000	10.471.100.769	3.185.771.000	7.000.000	0	13.644.271.969	(12.843.271.969)	0	0	0
0303	PLUKERINDO	0	124.000.000	424.659.000	0	0	548.659.000	(549.229.000)	0	0	0
0304	DINAS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	113.061.457.206	4.935.076.100	1.007.566.500	0	119.004.099.806	(119.074.499.806)	0	0	0
0305	DINAS TEKNOLOGI DAN TRANSFORMASI	0	2.185.117.735	534.500.000	53.500.000	0	3.779.117.735	(2.779.117.735)	0	0	0
0310	DINAS KEMENDUKUNGAN DAN PERENCANAAN	250.000.000	1.138.938.209	0	0	0	1.388.938.209	(788.938.209)	0	0	0
0311	KANTOR BELAJARAN	0	3.826.900.427	77.642.500	22.357.500	0	3.926.900.427	(3.129.900.427)	0	0	0
04	BID. PENGEMBANGAN LEMAH DAN BERKEMAJUAN	3.046.377.434	13.746.700.309	4.323.007.200	13.395.272.000	0	34.864.700.409	(31.824.322.700)	0	0	0
0401	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERKAWASAN	34.000.000	1.490.740.135	106.000.000	246.000.000	0	3.047.340.135	(1.827.340.135)	0	0	0
0402	DINAS PERIKANAN	104.287.000	4.150.732.436	3.800.748.700	15.500.250.000	0	23.579.731.407	(23.434.434.407)	0	0	0
0405	KANTOR KOPERASI DAN USAHA	0	352.282.485	10.000.000	111.000.000	0	463.282.485	(461.282.485)	0	0	0
0407	DINAS PERMUDAAN DAN KEMUDAAN	302.000.000	2.591.506.373	95.000.000	15.000.000	0	2.993.506.373	(2.363.700.373)	0	0	0
0408	DINAS PERAGAN	1.379.110.434	2.440.652.435	80.000.000	25.272.000	0	3.525.034.869	(1.179.763.500)	0	0	0
0409	DINAS PERKULIAHAN DAN PENYISWA	1.206.170.000	2.706.649.731	233.231.000	4.000.000	0	3.946.019.731	(1.744.510.731)	0	0	0
	JUMLAH	7.812.120.193.733	236.849.927.114	44.216.918.381	43.868.876.900	300.000.000	393.399.410.135	(332.709.539)	4409.429.977	19.025.207.515	(13.926.709.539)

**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAN PEGAWAI KONTRAK
PER 30 SEPTEMBER 2005**

GOLONGAN	ESELON						PEJABAT FUNGSIONAL	TOTAL
	I	II	III	IV	V	STAF		
	IV.e	-	-	-	-	-	-	
IV.d	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.c	-	9	-	-	-	-	6	15
IV.b	-	13	20	-	-	2	15	50
IV.a	-	1	82	24	-	1	1,381	1.489
Jumlah Gol. IV	-	23	102	24	-	3	1.402	1.554
III.d	-	-	24	187	-	12	1.120	1.343
III.c	-	-	3	283	-	28	952	1.266
III.b	-	-	-	19	31	333	605	988
III.a	-	-	-	1	18	458	513	990
Jumlah Gol. III	-	-	27	490	49	831	3.190	4.587
II.d	-	-	-	-	4	344	267	615
II.c	-	-	-	-	-	309	109	418
II.b	-	-	-	-	-	254	179	433
II.a	-	-	-	-	-	339	62	401
Jumlah Gol. II	-	-	-	-	4	1.246	617	1.867
I.d	-	-	-	-	-	58	-	58
I.c	-	-	-	-	-	16	-	16
I.b	-	-	-	-	-	-	-	-
I.a	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Gol. I	-	-	-	-	-	74	-	74
TOTAL PNS	-	23	129	514	53	2.154	5.209	8.082
PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)								1.192
PEGAWAI KONTRAK								91
TOTAL PEGAWAI KESELURUHAN								9.365

DAFTAR PINJAMAN DAERAH
Tanggal 30 September 2005

NO	URAIAN	TANGGAL/NOMOR SK. BUPATI DAN PERSETUJUAN DPRD	SALDO AWAL Tgl 2 Jan 2005	PENAMBAHAN TA 2005	PENGURANGAN TA 2005	SALDO AKHIR Tgl 30 Sept 2005	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADB-LOAN 1198 SLA-B46/DP/3/1996 Tgl 19 Januari 1996	12-Sep-95 No.650/3195/95 27 Februari 1995 No.70/2-IV/1994-1995	Pokok - Bunga -	- 0	0 0	- 0	0 0
2	PINJAMAN DARI BANK BPD JATENG	01-Apr-02 No.903/072/2002 01-Apr-02 No.DPRD.19/1-11/2002	Pokok 0 Bunga 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	PINJAMAN DARI BANK BPD JATENG	20 Desember 2003 NO.903/02035/2003 20 Desember 2003 No.DPRD.95/7-IV/2003	Pokok - Bunga -	- 0	0 0	- 0	0 0
4	PINJAMAN DARI BANK BPD JATENG	- -	Pokok 16.152.207.515 Bunga 326.760.000	Pokok Bunga	- -	16.152.207.515 326.760.000	0 0
	JUMLAH		16.478.967.515		-	16.478.967.515	0

DAFTAR INVESTASI DAERAH

Tanggal 31 Desember 2004

NO	URAIAN	TAHUN PERTAMA INVESTASI	NAMA PERUSDA/ LEMBAGA	SALDO AWAL Tgl 2 Jan 2005	PENAMBAHAN TA 2005	PENGURANGAN TA 2004	SALDO AKHIR Tl 30 Sept 2005	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Modal/Saham	1971	BKK Se Kab Tmg	453.364.000	200.000.000	0	653.364.000	
2	Modal/Saham	1976	PT.Bank BPD Jateng Cab Tmg	1.783.000.000	2.143.000.000	0	3.926.000.000	
3	Modal/Saham	1977	BPR Bank Pasar	1.757.968.916	0	0	1.757.968.916	
4	Modal	1986	PDAM	3.048.603.353	0	0	3.048.603.353	
5	Modal	1990	Apotik Waringin Mulyo	519.975.110	0	0	519.975.110	
6	Kredit Lunak	2002	BPR Bank Pasar	2.435.000.000	0	0	2.435.000.000	
7	Modal/Saham	2003	Perusda Aneka Usaha	350.000.000	40.000.000	0	390.000.000	
	JUMLAH			10.347.911.379	2.383.000.000	0	12.790.911.379	

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

Tanggal 31 Desember 2004

No	Maksud Mengadakan Dana Cadangan	Tahun Mulai Mengadakan Dana Cadangan	SALDO AWAL Tgl 2 Jan 2005	PENAMBAHAN 2005	PENGURANGAN 2005	SALDO AKHIR Tgl 30 Sept. 2005	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dana Cadangan	-	0	0	0	0	
	JUMLAH	-	0	0	0	0	

- 1) Diisi tanggal pada akhir bulan atau akhir tahun
- 2) Diisi tanggal pada awal bulan atau awal tahun
- 3) Diisi periode yang mencakup tanggal pada saldo awal sampai dengan tanggal pada saldo akhir